

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara tentang negara Mesir dan perannya terhadap negara-negara Arab lainnya, maka tidak dapat dilepaskan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah baik antara Negara-negara Arab itu sendiri maupun konflik dengan Israel. Sebagai kawasan di timur Tengah, kawasan orang-orang timur yang berada di tengah-tengah peta dunia ini, gejolak politik kawasan ini memiliki keunikan dan ketertarikan sendiri dibandingkan kawasan bumi lain. Permasalahan - permasalahan transnasional seperti keamanan, politik ekonomi dan sosial menjadi isu hangat dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Permasalahan yang signifikan lainnya meliputi perkembangan senjata pemusnah massal dalam hal ini kasus Irak dan Iran, perdagangan obat-obat terlarang seperti narkoba, penyelundupan senjata dan terorisme. Semuanya merupakan masalah global yang otomatis mempengaruhi kestabilan dunia Internasional. Pengelolaan sumber minyak dan ketersediaan air bersih merupakan isu internal kawasan yang paling sunter diperbincangkan. Keduanya menjadi bahan/objek subur dalam kajian kawasan tersebut pada jelang abad modern hingga saat ini (Jamzuri, 2014).

Konflik air di Timur Tengah dapat dilihat dalam konflik Iraq dan Suriah yang memperebutkan air di sungai Eufrat, pihak Suriah membuat bendungan untuk kepentingan sendiri negaranya, sedangkan Iraq berusaha menggagalkan pembentukan bendungan tersebut untuk menjaga agar pasokan air yang mengalir ke Irak tetap memadai. Hal ini yang menimbulkan ketegangan yang sangat besar (Aprilia, 2013). Dalam catatan sejarah, keterlibatan asing di era modern yang didominasi oleh barat, utamanya Amerika Serikat dan sekutu, telah terjadi jauh sebelum bentuk negara bangsa lahir di kawasan Timur Tengah. Konflik imperium kuno antara Mesir, Persia, dan Bizantium juga konflik ideologi antara tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi merupakan bukti nyata keterlibatan asing didalam ruang lingkup Timur tengah. Fakta menariknya adalah pada konflik Israel – Palestina, pihak pribumi yang menjustifikasi bahwa pihak lain sebagai pihak asing, justru dijustifikasi balik sebagai pihak asing, sementara pihak lain mengklaim dirinyalah pribumi (Jamzuri, 2014).

Berbagai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini jelas sangat mengganggu stabilitas kawasan ini yang dapat memicu konflik internal maupun eksternal yang berkepanjangan. Sehingga dibutuhkan aktor yang benar-benar dapat mengayomi negara-negara lainnya. Selain dibentuk organisasi regional yaitu Liga Bangsa Arab, maka Mesir lah yang dianggap pantas untuk berperan sebagai penengah negara-negara Arab lainnya, secara Negeri ini berada di sudut timur laut Afrika. Disebelah barat berbatasan dengan Libya, selatan dengan Sudan, utara dengan Laut Tengah (Laut Mediterania), dan di timur dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah.

Dengan demikian letak geografis Mesir sangat strategis karena berada pada titik pertemuan dua benua (Asia dan Afrika), sekaligus penghubung Laut Tengah dan Laut Merah yang disambungkan oleh Terusan Suez (Antara News). Selain itu juga mengingat Mesir adalah negara Arab yang paling banyak penduduknya, hampir seluruh populasi terpusat disepanjang sungai Nil, terutama Iskandariyah dan kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat terusan Suez. Selain itu letak strategis Mesir yang digolongkan sebagai negara maju di Afrika, juga sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur - tengah, dengan demikian Mesir memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam stabilitas di Timur Tengah dalam berbagai Aspek. Dalam menjalankan perannya tersebut, Mesir selalu berdiri dijejeran terdepan dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di timur Tengah. Pengaruhnya sangat cepat menyebar ke negara-negara Arab sekitarnya, sehingga Mesir disebut-sebut sebagai negara induk bagi negara-negara di wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa Mesir adalah negara yang paling menentukan dalam mengubah konstelasi politik dunia Arab. Sejarah membuktikan, setiap getaran politik di Mesir pasti memiliki dampak baik secara ekonomi maupun politik keseluruhan kawasan Timur Tengah.

Faktor lain yang mendukung dan menjadikan Mesir sebagai kekuatan utama di Timur Tengah adalah; yang pertama, dari segi politik Mesir memiliki kultur berbeda dengan negara lain. Dimana sistem pemerintahan Mesir yang sering mengalami masa transisi dari masaa ke masa sehingga kekuatan politik oposisi

pemerintah dan sistem demokrasi memungkinkan berkembang untuk kestabilan politik di Timur Tengah. Pada tahun 1952, terjadi revolusi yang menumbangkan kekuasaan absolut Raja Farouk. Revolusi yang dipimpin Kolonel Gamal Abdul Nasser itu mengubah system pemerintahan monarki yang berakar dari masa lampau menjadi sebuah pemerintahan modern berbentuk Republik. Mesir menjalankan roda pemerintahan secara dinamis dengan menjanjikan reformasi di segala bidang. Kejutan Politik Luar negeri Mesir pada tahun 1955 dengan mengenalkan ide persatuan Arab (Pan-Arab). Tahun ini pula Mesir berperan aktif pada konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. Dua momentum politik itulah yang menandai mulai terlibatnya Mesir dan aktifnya negara Piramida tersebut dalam gelanggang percaturan politik Internasional. Dan yang kedua, dari segi militer, militer Mesir dimata kalangan rakyat Timur Tengah masih dianggap sebagai penyelamat. Hal ini tidak terlepas ketika Mesir berhasil mendepak Farouk yang menjadi boneka Inggris dan pernah mengalahkan Israel dalam perang 1977, serta menghancurkan benteng yang paling terkenal milik Israel, yaitu Barlev (Anhar, Peran Mesir dalam Proses Perdamaian di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas, 2010).

Jika diperhatikan lebih dalam, maka akan ditemukan suatu kegagalan dalam perjanjian damai yang dilakukan oleh negara Mesir dan negara Israel, mengingat bahwa berdasarkan sejarah, terdapat beberapa konflik antara negara-negara Arab (termasuk Mesir) dengan Israel yang disebut dengan konflik Arab-Israel. Tercatat bahwa terjadi perang selama empat kali antara Arab dan Israel yaitu di tahun 1948,

1956, 1967, dan 1973. Perang Arab-Israel 1948 atau disebut juga sebagai “perang kemerdekaan” atau perang pembebasan oleh Israel, adalah konflik bersenjata pertama dari serangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya dalam konflik Arab-Israel. Bagi orang-orang Palestina, perang ini menandai awal dari rangkaian kejadian yang disebut sebagai “Bencana”. Pada tahun 1947, perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memutuskan untuk membagi wilayah mandat Inggris atas Palestina. Tetapi hal ini di tentang keras oleh negara-negara Timur Tengah lainnya dan juga banyak negeri-negeri muslim. Kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Sedangkan kota Yerussalem yang dianggap suci, tidak hanya oleh orang Yahudi tetapi juga orang Muslim, dan Kristen akan dijadikan kota Internasional. Puncaknya pada tanggal 14 mei 1948 Israel diproklamasikan sebagai sebuah negara, dan sehari kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan negara Arab lainnya. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB yang ditangani Inggris di Palestina. Perang ini menyebabkan banyak penduduk Palestina mengungsi dari daerah Israel. tetapi disisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya (Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014). Dan menyusul serangan dan peperangan selanjutnya seperti serangan militer Inggris, Perancis dan Israel terhadap Mesir pada tanggal 29 oktober 1956 akibat krisis Suez, perang enam hari atau perang Arab-Israel 1967 yang merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan

Suriah, dan ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang ini disebabkan oleh ketidakpuasan orang Arab atas kekalahannya dalam perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1956. Perang Yom Kippur, perang Ramadhan atau perang oktober, juga dikenal sebagai tahun 1973 adalah perang Arab-Israel keempat yang terjadi antara Israel dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah.

Dalam perjalanan tarik ulur konflik Arab-Israel, Mesir adalah yang menjadi tonggak utama Israel dalam penyelesaian konflik dan permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk keamanan Israel itu sendiri, hal ini mengingat bahwa Mesir adalah negara terbesar, terkuat, dan paling berpengaruh di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel. Berada di dataran rendah dan wilayahnya yang terlalu sempit dan dikelung negara-negara yang bermusuhan, Israel adalah negara yang sangat rentan dari sisi keamanan dan pertahanan. Permusuhan dengan Mesir berarti ancaman yang demikian besar bagi pertahanan dan keamanan negeri itu, bahkan eksistensinya di kawasan. Sebaliknya kerjasama keamanan dengan Mesir amat berguna bagi kepentingan keamanan dan pertahanan Israel (Dr. Burdah, 2012). Selain karena posisi Mesir yang sangat berpengaruh ditengah-tengah Arab lainnya, juga terdapat kepentingan strategis Israel yang lain di kawasan Timur Tengah yaitu normalisasi hubungan dengan negara-negara disekitarnya, terutama dalam bidang ekonomi. Mengingat Israel adalah negara yang hingga kini masih terkucilkan dalam pergaulan kawasan. Memelihara perdamaian dengan Mesir diharapkan akan menajdi

pintu masuk untuk membangun hubungan lebih normal dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Sehingga kerjasama dengan Mesir adalah hal yang mutlak bagi Israel.

Menanggapi hal tersebut selain perang, dalam kenyataannya antara bangsa Israel dan bangsa Arab juga banyak menempuh jalur diplomasi, salah satunya adalah kesepakatan damai Mesir-Israel di Camp David (1978). Saat itu Mesir diwakili presiden Anwar Sadat dan Israel oleh PM Menachim Begin, dengan disaksikan Presiden Jimmy Carter saling mengakui kedaulatan masing-masing. Sebagai imbalannya, Israel mengembalikan Gurun Sinai yang dikuasainya sejak perang 1967 kepada Mesir. Perjanjian inilah yang dianggap sebagai “Penghianatan” Mesir yang saat itu di pimpin oleh Anwar Sadat terhadap negara-negara Arab dan umat muslim di dunia karena sebelumnya (saat Gamal Abdul Nasser berkuasa) telah diadakan “*sumpah setia*” dan menyatakan “**Perang Abadi**” terhadap Israel (Meatos, 2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut;

“Bagaimana dampak dari kebijakan rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam perjanjian Camp David 1979-1989?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan pembahasan skripsi dan untuk membantu menjawab rumusan masalah dari judul yang diambil, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep. Didalam studi hubungan internasional itu sendiri memiliki banyak teori-teori maupun konsep yang nantinya akan mendukung penyelesaian masalah-masalah yang diangkat dan tergantung dari sisi apa masalah itu akan dijelaskan. Berikut kerangka pemikirannya.

### **Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan mempergunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada, serta ditujukan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. G. Modelski seperti dikutip oleh Umar suryadi bakri mengatakan bahwa politik luar negeri merupakan suatu sistem aktivitas suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk mengatur aktivitas negara itu sendiri. Fokus perhatian dari politik luar negeri itu sendiri hanya pada tindakan, kebijaksanaan terhadap lingkungan internasional (Ramdhany, 2008). Selain itu orientasi, peranan, dan tujuan politik luar negeri merupakan gambaran tentang susunan pemikiran pembuat kebijakan, sikap terhadap lingkungan eksternalnya, keputusan, dan aspirasi. Politik luar negeri juga memiliki unsur tindakan, yaitu sesuatu yang dilakukan pemerintah terhadap negara lain untuk memengaruhi orientasi, melaksanakan peranan atau untuk mencapai dan mempertahankan tujuan



tertentu. Tindakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang diharapkan mampu mengubah atau mempertahankan perilaku negara dan mengakibatkan pemerintah terikat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Negara (Ramdhany, 2008, hal. 16). Politik Luar negeri bisa dikatakan sebagai *action theory* dari kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Politik luar negeri digerakkan oleh keputusan suatu pemerintah, sekali keputusan itu dibuat, pelaksanaannya menyebabkan adanya proses sosial. Ada tiga macam proses yang menonjol dalam politik luar negeri yaitu kerjasama, konflik, atau hidup berdampingan. Hidup berdampingan dalam beberapa kerjasama terbatas adalah untuk mencegah konflik (Sariwaty, 2006).

Menurut KJ. Holsti kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Husna, 2012). Lingkup kebijakan luar negeri menurut Holsti meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut (Perwita & Yani, 2011). Sedangkan menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau,

apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai bangsa-negara (Perwita & Yani, 2011, hal. 49).

Kebijakan Luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian situasi di luar negaranya, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi yang merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi situasi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari persepsi, sikap, dan nilai-nilai.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen kongkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternalnya yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Pada fase ini rencana tindakan politik luar negeri ini akan memberikan pedoman bagi:

- a. Tindakan yang ditujukan pada situasi yang berlangsung lama, misalnya kebijakan luar negeri yang berkenaan dengan konflik Arab-Israel.
  - b. Tindakan yang ditujukan pada negara-negara tertentu.
  - c. Tindakan yang ditujukan pada isu-isu khusus, seperti kebijakan luar negeri mengenai pengawasan dan pelucutan persenjataan.
  - d. Tindakan yang ditujukan pada berbagai sasaran lainnya, misalnya isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia (Perwita & Yani, 2011, hal. 54).
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris yakni berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternalnya.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh James N. Rosenau, dan jika dikaitkan dengan konteks skripsi ini, maka politik luar negeri Mesir Pasca Perjanjian Camp David 1979 dan setelah kematian Anwar Sadat 1981 dan digantikan oleh Husni Mubarak adalah tetap membawa arah politik luar negeri Mesir condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tetapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu. Hanya saja dalam pembuatan keputusan kebijakan politik Mesir di bawah kepemimpinannya, Mubarak lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan hasil kesepakatan bersama atau konsensus. Selain itu Mubarak

Juga mengupayakan dunia Arab bersedia menerima kehadiran Mesir kembali dengan melakukan serangkaian langkah diplomatic (Antara News).

### **Organisasi Internasional**

Menurut Pariera Pandelangi Organisasi internasional memiliki arti ganda, yakni dalam arti luas dan sempit. Organisasi dalam arti luas maksudnya adalah organisasi yang melintasi batas negara (internasional) baik bersifat public maupun privat, sedangkan organisasi dalam arti sempit adalah organisasi internasional yang hanya bersifat public (Amalia, 2012).

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita & Yani, 2011, hal. 92). Awal organisasi internasional ini terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama dan perdamaian. Organisasi Internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota. Dalam arti luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintas batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama (Perwita & Yani, 2011, hal. 93).

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi

perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (Perwita & Yani, 2011, hal. 95). Sebagai suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak terkait.

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan status negara-negara Arab yang bersatu dan menjadikan identitas diri mereka sebagai negara-negara Arab yang tergabung dalam organisasi internasional dalam lingkup region (*regional*) yaitu Liga Bangsa Arab maupun dalam lingkup non-region seperti OKI dan GNB. Selain karena letak geografis yang saling berdekatan, mereka juga mengklaim bahwa mereka berasal dari satu bangsa yang sama yaitu Bangsa Arab. Hal tersebutlah yang melekat didalam masing-masing negara anggota. Selain itu juga karena adanya beberapa persamaan lainnya, seperti nilai-nilai, budaya, bahkan visi misi yang sama. Fakta mengatakan bahwa mayoritas anggota Organisasi baik Liga Arab, OKI dan GNB hingga saat ini masih dihadapkan pada masalah konflik dan ini merupakan fenomena global yang menuntut penyelesaian.

Sehingga ketika Mesir melakukan Perjanjian Perdamaian dengan Israel dalam perjanjian Camp David 1979, Mesir dianggap telah keluar dan menyimpang dari nilai-nilai, budaya dan visi misi yang dibangun bersama yaitu perang abadi melawan Israel. Liga Arab, OKI dan GNB lantas mengambil langkah atas perannya sebagai

aktor independen dalam sebuah organisasi dengan mengeluarkan Mesir dari keanggotaan organisasi tersebut. Hal ini membawa situasi atau kondisi dimana Mesir terisolasi dan dikucilkan dalam dunia Arab Pasca Perjanjian Camp David 1979.

Alih-alih mendapatkan perlakuan tersebut, baik dari Organisasi internasional maupun negara-negara Arab, Mesir kembali mengandalkan dan berupaya agar organisasi-organisasi internasional bisa menjadi aktor penengah atau mediator dalam konflik yang terjadi dalam internal bangsa Arab. Dalam hal ini pula Mesir juga melakukan pendekatan dengan organisasi-organisasi regional maupun internasional untuk kembali memperbaiki hubungan, mengingat baik OKI (Organisasi Kerjasama Islam) maupun Liga Bangsa Arab dan GNB (Gerakan Non-Blok) sempat membekukan atau menggantung keanggotaan Mesir dalam Organisasi tersebut pasca perjanjian damai Camp David 1979.

Mengingat bahwa sepanjang abad ke-20, para negara telah melihat para tetangga dekat mereka sebagai sumber-sumber ancaman atau perlindungan yang potensial. Dengan memberi fokus pada para tetangga ini, para negara telah berupaya menyusun aturan-aturan dan norma-norma tentang bagaimana para negara di dalam suatu pengelompokan regional tertentu seharusnya bertindak (Asmoro, 2011). Dengan demikian akan menjadi pertimbangan bagi Liga bangsa Arab maupun organisasi internasional lainnya seperti OKI dan GNB untuk menerima Mesir kembali dan eksis di dalam dunia Arab untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan.

#### **D. HIPOTESIS**

Kebijakan rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam perjanjian Camp David 1979 membawa dampak dan perubahan besar dalam peran dan hubungan Mesir di Dunia Arab yaitu;

1. Mesir dikucilkan dari Organisasi regional maupun internasional, seperti Liga Arab, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), dan GNB (Gerakan Non-Blok)
2. Negara-negara Arab memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Mesir.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk :

1. Menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan metodologi yang sesuai dengan ranah ilmu hubungan internasional.
2. Memberikan kontribusi analisa kawasan Timur Tengah dari sudut pandang yang berbeda.
3. Mengetahui tujuan dan motif Mesir menjalin hubungan baik (jalan damai) dengan Israel, serta bagaimana kelangsungan peran dan hubungan Mesir di Dunia Arab Pasca perjanjian damai antara Mesir dengan Israel ( perjanjian Camp David).



4. Mengetahui Politik Luar Negeri Mesir pasca perjanjian Camp David dan dampak dari kebijakan rekonsiliasi Mesir tersebut.
5. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata-1 (S1) di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, penentuan metodologi dilakukan agar penelitian menjadi sistematis. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan sifat penelitian deskriptif. Metode deduktif adalah metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris atau secara singkat menelaah suatu prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus. Penelitian deskriptif yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan digambarkan secara sistematis. Kemudian data diolah melalui sumber-sumber yang valid yakni berupa data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, makalah-makalah, surat kabar, dan juga media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan.

## **G. Jangkauan Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang dampak dari kebijakan rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam perjanjian Camp David 1979. Jangkauan pembahasannya, melakukan penelitian analisis dari tahun ditandatanganinya perjanjian Camp David 1979 yang terjadi antara Mesir dengan Israel dimasa pemerintahan Anwar Sadat dan Menachem Begin, juga keterlibatan Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut dimasa pemerintahan Presiden Jimmy Carter dan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca Perjanjian Camp David 1979 sampai tahun 1989, yaitu tahun dimana berakhirnya masa-masa terkucilkannya Mesir dari dunia Arab.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Jangkauan pembahasan, dan Sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang menjelaskan tentang Dinamika hubungan Mesir dengan negara-negara Arab lainnya dan Politik Luar Negeri Mesir (Anti Israel) sebelum tahun 1979

BAB III Merupakan bab yang menjelaskan tentang perdamaian Mesir dengan Israel dalam perjanjian Camp David 1979 serta Politik Luar Negeri Mesir Pasca Perjanjian dama Camp David 1979

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang dampak kebijakan rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam Perjanjian damai (Camp David 1979)

BAB V Merupakan bab yang akan memaparkan sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya